
ANALISA KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN), PADA DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT, KEMENTERIAN PERTANIAN

¹ Ratiyah, ² Hartanti, ³ Eka Dyah Setyaningsih

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika

¹ratiyah.rty@bsi.ac.id, ²hartanti.hti@bsi.ac.id, ³eka.edy@bsi.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian, (2) mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Direktorat Sayuran Dan Tanaman Obat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: dokumentasi dan teknik observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis varians, teknis analisis efisiensi dan teknis analisis efektivitas. Analisis varians digunakan untuk membandingkan selisih/perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dalam laporan keuangan. Analisis efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dan analisis efektivitas digunakan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa : Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020 sebesar Rp. 143.512.796.000 dan Rp. 126.054.851.463, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 17.457.944.537,- atau sebesar 12,16%, artinya efisien. Dan total realisasi anggaran selama tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 sebesar Rp. 126.064.851.463 atau sebesar 90,81% artinya efektif.

Keywords; Kinerja Keuangan, Kinerja Anggaran, APBN

A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat undang-undang yaitu Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005. APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan serta prioritas pembangunan secara umum. Kewenangan Kementerian Pertanian, Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah untuk mengelola anggaran negara. Berangkat dari keingintahuan untuk menilai kinerja Keuangan Direktorat Sayuran Dan Tanaman Obat maka tentunya hal tersebut tidak lepas dari data-data anggaran dan tetap berpatokan pada kemampuan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangannya melalui APBN dengan asumsi bahwa semua syarat yang digunakan untuk menentukan hasil metode analisis varians, tingkat efisiensi maupun efektivitasnya sudah terpenuhi.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Ada beberapa definisi analisis laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Harjito dan Martono (2011:51), Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi.
2. Menurut Harahap (2011:190), Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu

dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (2015:2) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Harahap (2015:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu.

ANALISIS RASIO

Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi (Kasmir, 2013:72). Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, seorang analis dapat mempelajari komposisi perubahan yang terjadi dan menentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi keuangan dan kinerja keuangan selama waktu tersebut. Analisis rasio keuangan dapat dibedakan berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis (Agus Harjito dan Martono, 2011:53), yaitu:

1. Analisis individual, yaitu analisis yang dilakukan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan, misalnya analisis rasio bagi unsur-unsur yang ada pada laporan neraca saja atau laporan laba rugi saja.

2. Analisis silang, yaitu analisis rasio yang melibatkan unsur-unsur yang ada pada laporan neraca dan sekaligus yang ada pada laporan laba rugi.

Menurut Hery (2017:140) kegunaan analisis rasio keuangan bagi tiga kelompok utama pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Manajer perusahaan, menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan.
2. Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank yang menganalisis rasio-rasio untuk mengidentifikasi kemampuan debitur dalam membayar hutang-hutangnya.
3. Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan.

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Menurut Indra Bastian (2014:6), Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2015:14), Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik.

Sedangkan Halim (2014:18), berpendapat bahwa Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas Pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah Proses pencatatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang dilakukan pada sektor publik seperti pemerintah.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)

dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan unsur-unsur seperti: pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

c. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (SAP, 2005).

Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan penyajian informasi tentang kebijakan akuntansi

yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

KINERJA PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Bastian (2001:329) menjelaskan bahwa definisi kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat penciptaan pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Artinya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi dimasa yang akan datang. Pelaporan kinerja pemerintah melalui laporan keuangan merupakan wujud dari proses akuntabilitas (Mahsun,dkk, 2006:186). Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (users) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya (Mardiasmo, 2007:121). Pada organisasi sektor publik tidaklah mudah untuk melakukan pengukuran kinerja, terutama yang pure nonprofit seperti pemerintah. Selama ini pengukuran keberhasilan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif (Mahsun, dkk 2006). Artinya, selama ini pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam menyerap anggaran (Mahsun, dkk)

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pengelolaan APBN dimaksud untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input, yaitu perbandingan antara realisasi

pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan dikalikan dengan seratur dalam bentuk presentasi (Mardiasmo, 2002:8):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Pendapata}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan total realisasi pendapatan yang menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah.

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan total anggaran pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Mahsun, 2006:18).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan menggunakan ukuran efektivitas tersebut dapat diketahui kinerja keuangan APBN.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau mengevaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran ataupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Observasi

Jenis observasi yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi non partisipan dan jenis observasi sistematis. Peneliti menggunakan observasi non partisipan karena dalam penelitiannya tidak ikut andil dalam segala macam kegiatan yang dilakukan observe. Penggunaan observasi sistematis bertujuan supaya observasi yang dilakukan oleh peneliti terstruktur, tidak keluar dari alur penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati perilaku agresif yang ditunjukkan oleh siswa. observasi juga digunakan untuk mengetahui secara langsung bentuk bimbingan yang dilakukan oleh guru dan orang tua pada saat siswa berperilaku agresif.

b. Wawancara

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, interview atau wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topic tertentu. Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber mengenai siswa yang berperilaku agresif, serta untuk mencari data kepada guru dan orang tua mengenai pemberian bimbingan terhadap siswa yang berperilaku agresif.

TEKNIK ANALISIS DATA

1. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pengelolaan APBN dimaksud untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input, yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan dikalikan dengan seratur dalam bentuk presentasi (Mardiasmo, 2002:8):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Pendapata}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan total realisasi pendapatan yang menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah.

2. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan total anggaran pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Mahsun, 2006:18).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan menggunakan ukuran efektivitas tersebut dapat diketahui kinerja keuangan APBN.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian setelah adanya perubahan organisasi dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat. Sesuai dengan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015, Pasal 441, tugas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya dan tanaman obat.

Analisis Data

Hasil Analisis Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 sampai dengan 2020

Tabel 4.1. Hasil Analisis Anggaran Dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Sampai Dengan 2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah		Selisih (Rp)	Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	2016	15.033.271.000	12.652.760.796	2.380.510.204	15,83
2	2017	15.542.405.000	12.833.653.620	2.708.751.380	17,43
3	2018	9.850.307.000	9.637.724.488	212.582.512	2,16
4	2019	11.522.322.000	11.008.996.464	513.325.536	4,46
5	2020	91.564.491.000	78.969.083.095	12.595.407.905	13,76
RATA-RATA		28.702.559.200	25.020.443.693	3.682.115.507	10,73

Hasil Perbandingan Selisih Anggaran Tahun 2016 sampai dengan 2020

Tahun Anggaran	Selisih Perbandingan (Rp)	Selisih Perbandingan (%)
2016 - 2017	328.241.176	1,59
2017 - 2018	2.496.168.868	15,27
2018 - 2019	300.743.024	2,30
2019 - 2020	12.082.082.369	9,30
RATA-RATA SELISIH	3.801.808.859	7,12

Pembahasan

Setelah mengadakan analisis data dengan menggunakan analisis varians antara kinerja aktual dengan yang di anggarkan, analisis efisiensi, dan analisis efektivitas, maka perlu ada pembahasan lebih lanjut dari hasil analisis tersebut.

Pembahasan pertama adalah mengenai hasil varians dan pembahasan kedua mengenai hasil analisis efisiensi dan analisis efektivitas.

1. Pembahasan Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian dengan menggunakan analisis varians.

Tahun Anggaran 2016

Sisa anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.2.380.510.204,- atau setara dengan 15,83% lebih rendah dari sisa anggaran tahun 2017 Rp.2.708.751.380,- atau setara dengan 17,43%. Hal ini disebabkan karena adanya:

- 1) Akun belanja perjalanan dinas biasa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.609.071.812,- atau setara dengan 13,23% disebabkan oleh adanya efisiensi dana perjalanan dinas, melainkan semua output sudah tercapai;
- 2) Akun Belanja Honor Output Kegiatan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.98.700.000,- atau setara dengan 22,95% disebabkan oleh adanya efisiensi biaya melainkan semua output telah tercapai.
- 3) Akun Belanja Barang Fisik Lainnya diserahkan ke Masyarakat terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.211.321.214,- atau setara dengan 36,64% disebabkan oleh adanya efisiensi biaya, karena penawaran harga dari penyedia lebih rendah, tetapi output sudah tercapai;
- 4) Akun Belanja Bahan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.683.000 atau setara dengan 50,52% disebabkan oleh adanya efisiensi biaya melainkan semua output sudah tercapai.
- 5) Akun Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota sebesar Rp.25.080.000,- atau setara dengan 61,65% disebabkan oleh adanya efisiensi biaya melainkan semua output telah tercapai,
- 6) Akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terdapat sisa anggaran Rp. 3.100.000,- atau setara dengan 100%,
- 7) Akun Perjalanannya Lainnya terdapat sisa anggaran Rp.25.800.000,- atau setara dengan 100% disebabkan oleh adanya efisiensi biaya melainkan semua output telah tercapai,
- 8) Akun Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdapat sisa anggaran sebesar Rp.14.940.000,- atau setara dengan 31,13%

Tahun Anggaran 2017

Sisa anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 2.708.751.380,- atau setara dengan 17,43% atau lebih tinggi dari sisa anggaran tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.380.510.204,- atau setara dengan 17,43%. Hal ini disebabkan karena adanya:

- 1) Akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.505.650.000,- atau setara dengan 30,93% disebabkan adanya efisiensi biaya, sedangkan semua output telah tercapai.

- 2) Akun Belanja Bahan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.25.357.000,- atau setara dengan 16,52% disebabkan adanya efisiensi biaya, sedangkan semua output telah tercapai.
- 3) Akun Belanja Perjalanan lainnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp.18.296.000,- atau setara dengan 52,27% disebabkan oleh adanya efisiensi biaya, melainkan semua output sudah terpenuhi;
- 4) Akun Belanja Perjalanan Biasa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.59.802.650,- atau setara dengan 7,55% disebabkan oleh adanya efisiensi biaya, melainkan semua output sudah terpenuhi;
- 5) Akun Belanja Sewa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.6.910.000,- atau setara dengan 52,43% disebabkan adanya efisiensi biaya, sedangkan semua output telah tercapai.
- 6) Akun Belanja Jasa Profesi terdapat sisa anggaran sebesar Rp.7.200.000 atau setara dengan 22,36% disebabkan adanya efisiensi biaya, sedangkan semua output telah tercapai.

Tahun Anggaran 2018

Sisa anggaran pada tahun 2018 ini lebih sedikit dari tahun lainnya, baik dari segi persentasi ataupun dalam nilai rupiah yaitu sebesar Rp. 212.582.512,- atau setara dengan 2,16%. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Akun Belanja Sewa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.23.865.000,- atau setara dengan 30,26% disebabkan oleh efisiensi biaya, namun semua output telah terpenuhi,
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota terdapat sisa sebesar Rp.53.349.1450,- atau setara dengan 3,83%, disebabkan oleh efisiensi biaya, namun semua output telah terpenuhi,
- 3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota terdapat sisa anggaran sebesar Rp.12.690.000,- atau setara dengan 48,21% disebabkan oleh efisiensi biaya, namun semua output telah terpenuhi,
- 4) Akun Belanja Bahan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.36.122.750,- atau setara dengan 11,94% disebabkan oleh efisiensi biaya, namun semua output telah terpenuhi,

- 5) Belanja Perjalanan Biasa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.17.628.009,- atau setara dengan 0,54% disebabkan oleh efisiensi biaya, namun semua output telah terpenuhi.

Tahun Anggaran 2019

Sisa anggaran pada tahun 2019 tidak jauh beda dengan sisa anggaran tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 513.325.536,- atau setara dengan 4,46%. Hal tersebut disebabkan oleh:

- 1) Akun Beban Sewa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.66.862.000,- atau setara dengan 43,33% disebabkan oleh efisiensi biaya, dan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Pandemi Covid-19 namun semua output telah tercapai,
- 2) Akun Beban Jasa Profesi terdapat sisa anggaran sebesar Rp.67.537.000,- atau setara dengan 12,31% disebabkan oleh efisiensi biaya, dan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Pandemi Covid-19 namun semua output telah tercapai,
- 3) Akun Belanja Perjalanan Biasa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 44.239.770,- atau setara dengan 5,57% disebabkan oleh efisiensi biaya, dan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Pandemi Covid-19 namun semua output telah tercapai,
- 4) Akun Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota terdapat sisa anggaran sebesar Rp.33.340.000,- atau sebesar 48,79% disebabkan oleh efisiensi biaya, dan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Pandemi Covid-19 namun semua output telah tercapai,
- 5) Akun Belanja Perjalanan Lainnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp.213.914.540,- atau setara dengan 6,55% disebabkan oleh efisiensi biaya dan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Pandemi Covid-19, namun semua output telah tercapai,

Tahun Anggaran 2020

Sisa anggaran pada tahun 2020 adalah sisa anggaran terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 12.595.407.905,- atau setara dengan 13,76%. Pada tahun 2020 Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat

Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian mendapat mandat dari Menteri Pertanian untuk Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sehingga mendapatkan Anggaran yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 91.564.491.000,-.

Adapun sisa anggaran disebabkan oleh:

- 1) Akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.020.636.603,- atau setara dengan 14,24% yaitu sebagai efisiensi biaya, sedangkan semua output telah tercapai.
 - 2) Akun Belanja Perjalanan Dinas – Penangan Pandemi COVID 19 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 863.158.658,- atau sebesar 28,41% disebabkan efisiensi biaya dan juga disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi, namun semua output telah tercapai.
 - 3) Akun Belanja Barang Non Operasional - Penangan Pandemi COVID 19 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 538.000.000,- atau setara dengan 62,56% disebabkan efisiensi biaya dan juga disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besara pada masa pandemi, namun semua output telah tercapai.
 - 4) Akun Belanja Jasa Profesi terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- atau setara dengan 51,55% disebabkan efisiensi biaya dan juga disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besara pada masa pandemi, namun semua output telah tercapai.
 - 5) Akun Belanja Jasa – Penanganan pandemic Covid-19 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 298.000.000,- atau setara dengan 37,25% disebabkan efisiensi biaya dan juga disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi, namun semua output telah tercapai.
2. Pembahasan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian.

Tingkat Efisiensi

Dengan melihat hasil analisis diatas tentang Perencanaan Anggaran dan Ralisasi Anggaran pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020 dengan tingkat efisiensi sebesar 10,73%, yang berarti efisien dan dapat dikatakan tingkat pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian adalah efisien.

Tingkat Efektivitas

Dengan melihat hasil analisis diatas tentang Perencanaan Anggaran dan Ralisasi Anggaran pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020 maka dapat diketahui tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020 dengan tingkat efektivitas yang berarti efektif dan dapat dikatakan tingkat pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian adalah efektif.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian pada tahun 2016 – 2020 adalah rata-rata tidak terserap sebesar Rp.3.682.115.507 atau setara dengan 10,73%, hal ini disebabkan oleh :
 - Akun Belanja Perjalanan Dinas terdapat anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh karena adanya efisiensi biaya dan juga disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19, sehingga tahun anggaran 2019 dan 2020 sehingga terdapat sisa anggaran akan tetapi semua output telah tercapai.
 - Akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA terdapat anggaran yang tidak terserap oleh karena adanya efisiensi biaya, sedangkan semua output telah tercapai.
2. Tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian dimana selama

periode penelitian tahun anggaran 2016-2020 dengan tingkat efisiensi 90,81% yang berarti kurang efisien dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian adalah kurang efisien.

Tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian tahun anggaran 2016-2020 dengan tingkat efektivitas sebesar 110,98% yang berarti sangat efektif dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian adalah efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Rosda.
- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Agus Harjito dan Martono, 2011. *Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Penerbit EKONISIA, Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi, Irham. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta., 2017.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: Grasindo
- Kasmir, 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Komaruddin, 2001. *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Jakarta, Bumi Aksara
- Mardiasmo, 2014. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Lima, Cetakan Keempat, Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Soejadi, 1997, *Analisis Manajemen Modern*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- The Liang Gie, 1989. *Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta : Salemba Empat

